

POLICY BRIEF

POLITICALLY EXPOSED PERSON  
**Dalam Jejaring  
Biodiesel Indonesia**



**POLITICALLY EXPOSED PERSON**

**Dalam Jejaring Biodiesel Indonesia**

**Penyunting:**

Timer Manurung, Roni Saputra, Andi Muttaqien,  
Chandra Natadipurba

**Penulis:**

Sesilia Maharani Putri, Akhmad Kamaluddin, Ifziwarti,  
Sayyidatihayaa Afra

**Pengumpulan dan pengolahan data:**

Agnes Dian Pratiwi, Dendi Alfitrah, Hafid Azi Dharma,  
Yustinus Seno, Dhaniel Defa Afrian

**Dipublikasikan:**

2024

POLICY BRIEF

POLITICALLY EXPOSED PERSON

# Dalam Jejaring Biodiesel Indonesia



## DAFTAR ISI

<b>BAB 1. PENGANTAR</b>	<b>5</b>
<b>BAB 2. TEMUAN KUNCI</b>	<b>7</b>
<b>BAB 3. METODOLOGI</b>	<b>10</b>
Sumber dan Analisis data	10
Regulasi dan Kebijakan Mengenai Biodiesel	10
<b>BAB 4. ANALISIS REGULASI DAN KEBIJAKAN BIODIESEL</b>	<b>12</b>
<b>BAB 5. JEJARING BIODIESEL INDONESIA</b>	<b>15</b>
Penerima Subsidi Biodiesel 2015-2023	15
<i>Politically Exposed Person</i> (PEP) di Jejaring Biodiesel Indonesia	15
<b>BAB 6. PENUTUP</b>	<b>34</b>



## BAB I. PENGANTAR

Biodiesel kerap dianggap bahan bakar ramah lingkungan sehingga dijadikan sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil solar. Peraturan Presiden mengenai Kebijakan Energi Nasional bahkan memasukkan biofuel, yang mana biodiesel adalah salah satu jenisnya, sebagai salah satu jenis energi terbarukan. Pengembangan bahan bakar alternatif ini merupakan respon pemerintah mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap minyak bumi, termasuk dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kerangka Energi Nasional (KEN) yang bertujuan menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri. Perpres ini, misalnya, menargetkan penggunaan biofuel pada 2025 mencapai 5% dari seluruh konsumsi energi nasional.

Secara resmi realisasi biodiesel ditandai dengan adanya *blueprint* pengadaan biofuel yang dirancang oleh Timnas BBN. *Blue print* tersebut berupa target pentahapan penggunaan biofuel dalam kebutuhan energi Indonesia hingga 2025 yang bersifat mandatori. Dalam mandatori ini terdapat 3 jenis Bahan Bakar Nabati yang akan dikembangkan yaitu Biodiesel, Bioethanol, dan Minyak Nabati Murni.

Sebagai upaya memajukan sektor energi sesuai dengan Kerangka Energi Nasional (KEN), Indonesia telah mengidentifikasi potensi 60 jenis tanaman sebagai potensi bahan baku biodiesel, seperti yang diungkap oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam suatu makalah<sup>1</sup>. Makalah ini kemudian menjadi pijakan awal pengembangan biofuel di Indonesia. Workshop sosialisasi yang digelar oleh Timnas BBN mengungkapkan bahwa

---

<sup>1</sup>Shintawati, A. 2006. Prospek pengembangan biodiesel dan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif di Indonesia. Economic Review Nomor 203. [Prospek\\_biodiesel-libre.pdf \(d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net\)](https://www.cloudfront.net/d1wqtxts1xzle7/prospek_biodiesel-libre.pdf)

pemerintah telah mengalokasikan lahan untuk berbagai komoditas sebagai bahan baku biodiesel, berupa 52.215 hektare (ha) tanaman singkong, 420.100 ha tebu, 20 ha kebun bibit sorghum manis, 151.240 ha jarak pagar, dan 400.000 ha sawit<sup>2</sup>.

Namun pada perjalanannya, perlahan tapi pasti, bahan baku utama yang digunakan untuk biodiesel adalah minyak sawit. Hingga 2023, 100% kebutuhan biodiesel Indonesia dipenuhi oleh industri sawit. Langkah-langkah strategis dari pemerintah, seperti menunjuk perusahaan sawit sebagai produsen biodiesel dan memberikan subsidi, semakin memperkuat dominasi industri sawit.

Meski perkembangan industri biodiesel tercatat pesat, tampaknya keuntungannya lebih merata di kalangan korporasi dan grup-grup besar. Sejak 2015, ESDM mempercayakan pemenuhan biodiesel dengan menunjuk perusahaan produsen dan disokong oleh dana perkebunan sawit. Berbekal penunjukan dari Kementerian ESDM, sebesar 79% dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diberikan kepada perusahaan produsen biodiesel.

Di sisi lain, berbagai problematika tidak terlepas dari Industri ini. Tidak adanya transparansi terhadap kriteria penerimaan subsidi biodiesel<sup>3</sup> dan diikuti oleh keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan besar patut dipertanyakan. Sebagai Industri hilir, biodiesel sangat bergantung dengan sektor perkebunan sebagai industri hulu. Bahkan biodiesel sendiri tidak pernah disebutkan dalam Undang-Undang Perkebunan.

Di tengah era keterbukaan informasi, informasi terkait siapa di balik biodiesel sendiri masih sangat minim. Pengendali perusahaan dalam hal ini pemilik maupun orang dengan jabatan penting di perusahaan seringkali menjadi hal yang perlu diperhatikan. Terlebih lagi jika pengendali perusahaan tersebut memiliki jabatan publik atau lebih dikenal dengan *Politically Exposed Person* (PEP). *Politically Exposed Person* sendiri diartikan sebagai orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik di antaranya: penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.<sup>4</sup>

Keberadaan PEP dalam struktur perusahaan membuat perusahaan tersebut memiliki potensi dalam penyalahgunaan kekuasaan, praktek korupsi dan suap serta pencucian uang. Hal inilah yang kemudian mendasari kajian dilakukan untuk menelusuri lebih jauh apakah industri biodiesel berkaitan dengan orang-orang dengan jabatan tertentu. Dugaan-dugaan tersebut perlu ditelusuri karena belum ada transparansi terhadap asal dan realisasi penggunaan biodiesel sepanjang mandatori biodiesel diimplementasikan.

<sup>2</sup> [Kementerian ESDM RI - Media Center - Arsip Berita - Timnas BBN Gelar Workshop Sosialisasi Pengembangan Bahan Bakar Nabati \(BBN\)](#)

<sup>3</sup> Masih terdapat berbagai perdebatan terhadap penggunaan istilah subsidi. Pemerintah tidak menggunakan istilah subsidi dalam hal pembiayaan biodiesel dikarenakan sumber dana bukan berasal dari APBN atau pemerintah. Dalam konteks yang lebih luas, tim penulis mengartikan dana yang dibayarkan oleh BPDPKS untuk menutupi perbedaan harga antara biodiesel dan solar ini sebagai bantuan berbentuk subsidi. Dari segi sumber dana, dana kelapa sawit berasal dari pungutan ekspor dan bea keluar CPO, berupa pajak yang ditarik oleh pemerintah.

<sup>4</sup> [Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 - Penerapan Program Anti Pencucian Uang \(APU\) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme \(PPT\) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat](#)



## BAB II. TEMUAN KUNCI

- Dana subsidi yang dikucurkan pemerintah untuk biodiesel sejak 2015 hingga 2023 sebesar Rp179 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 29 perusahaan produsen biodiesel yang terbagi kedalam 15 kelompok korporasi. Lima besar grup penerima subsidi biodiesel adalah Wilmar (Rp56,6 triliun), Musim Mas (Rp26,5 triliun), Royal Golden Eagle (Rp21,3 triliun), Permata Hijau (Rp14,9 triliun), dan Sinar Mas (Rp14 triliun).
- Pemilik manfaat maupun pengurus perusahaan di 3 dari 12 grup usaha yang menerima subsidi biodiesel pada 2023 teridentifikasi sebagai *Politically Exposed Persons* (PEP). PEP terbanyak ditemukan pada Jhonlin Grup (9 orang), Sinar Mas (4 orang), dan Wilmar (4 orang). Kategori PEP di masing-masing perusahaan dapat dilihat pada gambar 8. Tidak hanya itu, 5 orang PEP merupakan bagian dari tim pemenangan atau tim sukses dalam pemilihan presiden pada 2019 dan 2024.
- Keberadaan PEP dalam struktur kepengurusan maupun pemilik manfaat terindikasi memiliki pengaruh terhadap jumlah subsidi yang diterima. Wilmar yang memiliki 5 orang PEP mendapatkan jumlah subsidi paling besar di antara semua grup usaha, sedangkan Jhonlin Group dengan 9 orang PEP, baru mendapatkan alokasi biodiesel pada 2022 namun jumlah subsidi yang diterima telah mencapai Rp1,8 triliun.
- CPO untuk biodiesel Indonesia berasal dari 902 mill dari 25 provinsi. Selain PT Ciliandra Perkasa yang berada di bawah First Resources Grup, mayoritas CPO yang diterima *refinery* berasal dari pihak ketiga atau mill yang bukan anak usaha dari grup tersebut.

## BAB III. METODOLOGI

### III. 1. Sumber dan Analisis Data

#### Data Administrasi Hukum Umum (AHU)

Sumber data primer yang digunakan dalam laporan ini adalah AHU yang tersedia pada laman [Kementerian Hukum dan HAM](#) dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan 12 grup usaha<sup>5</sup> biodiesel, dengan tahun akses data 2023. Data ini digunakan untuk melacak pemegang saham dan orang-orang yang menduduki jabatan penting di 310 perusahaan yang terafiliasi dengan 12 grup penerima subsidi biodiesel. Lengkapnya dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.** Jumlah informasi yang diprofil berdasarkan data AHU 12 Grup Biodiesel.

Grup	Perusahaan	Pemegang Saham dan Jabatan di Perusahaan
Wilmar	33	36
Best Group	16	13
First Resources	29	15
RGE	43	39
KPN	46	52
Musim Mas	24	33
Permata Hijau	8	16
Sinar Mas	67	53
Jhonlin	15	32
LDC	4	8
Wings	6	20
Sungai Budi	19	16
<b>Jumlah</b>	<b>310</b>	<b>333</b>

#### Keterlacakan Rantai Pasok Biodiesel

Dokumen laporan keterlacakan atas sumber bahan baku sawit (*traceability report*) yang dipublikasikan oleh perusahaan merupakan dokumen yang digunakan untuk melacak rantai pasok biodiesel. Berdasarkan laporan tersebut, dapat diketahui CPO dari *mill* ke *refinery*. Dari 21 perusahaan (12 grup usaha) produsen biodiesel pada 2023, hanya 16 perusahaan (7 grup) yang mempublikasikan *traceability report* atas kilangnya, sehingga dalam kajian ini hanya dapat memetakan 16 perusahaan saja.

Daftar perusahaan yang mempublikasikan *traceability report*-nya dapat dilihat pada tabel 2. Data *traceability report* yang digunakan merupakan kompilasi dari *supplier* sawit yaitu *mill* ke *refinery* selama 1 tahun. Seluruh data *supplier* tersebut adalah data 2022, kecuali perusahaan milik Wilmar yang mempublikasikan data 2021. Data *mill* yang dipetakan merupakan *mill*

<sup>5</sup> Istilah 'grup usaha' tersebut mengacu kepada badan usaha/perusahaan yang sahamnya dimiliki secara penuh atau sebagian oleh individu atau badan usaha yang sama secara langsung atau melalui badan hukum lain. Dalam laporan ini, pengidentifikasian orang-orang yang memiliki jabatan penting di perusahaan utama dan jabatan di perusahaan lain diidentifikasi sebagai perusahaan terafiliasi.

pemasok minyak mentah atau CPO, dan mengecualikan *mill* yang hanya mengirimkan *palm kernel oil* (PKO).

**Tabel 2.** Perusahaan penerima alokasi biodiesel 2023 yang mempublikasikan *traceability report* di situs perusahaan/grup usaha.

No	Perusahaan	Nama Kilang	Grup	Traceability Report
1	PT Batara Elok Semesta Terpadu	Batara Elok Semesta Terpadu (Gresik)	Best Industry	Tidak Ada
2	PT Ciliandra Perkasa	Ciliandra Perkasa Refinery	First Resources	Ada
3	PT Eco Prima Energi	Eco Prima Energi Refinery	Wings	Tidak Ada
4	PT Energi Unggul Persada	Energi Unggul Persada Refinery Site Bontang	KPN Corp	Tidak Ada
5	PT Intibenua Perkasatama	IBP-LGNG	Musim Mas	Ada
6	PT Jhonlin Agro Raya	Jhonlin Agro Raya Refinery	Jhonlin	Tidak Ada
7	PT Kutai Refinery Nusantara	Kutai Refinery Nusantara	Royal Golden Eagle	Ada
8	PT LDC Indonesia	Louis Dreyfus Commodities Lampung	Louis Dreyfus	Ada
9	PT Multi Nabati Sulawesi	MNS Bitung	Wilmar	Ada
10	PT Multimas Nabati Asahan	MNA Serang	Wilmar	Ada
11	PT Musim Mas	MM-BTM	Musim Mas	Ada
		MM-KIM 2	Musim Mas	Ada
12	PT Pelita Agung Agrindustri	Pelita Agung Agrindustri Simpang Bako	Permata Hijau	Ada
		Pelita Agung Agrindustri Pelintung	Permata Hijau	Ada
13	PT Permata Hijau Palm Oleo	Permata Hijau Palm Oleo	Permata Hijau	Ada
14	PT Sari Dumai Oleo	Sari Dumai Oleo	Royal Golden Eagle	Ada
15	PT Sari Dumai Sejati	Sari Dumai Sejati Refinery	Royal Golden Eagle	Ada
16	PT Sinarmas Bio Energy	Marunda Refinery	Sinar Mas	Ada
17	PT SMART Tbk	Tarjun Refinery	Sinar Mas	Ada
18	PT Sukajadi Sawit Mekar	SSM-BGD	Musim Mas	Ada
19	PT Tunas Baru Lampung	Tunas Baru Lampung - Lampung	Sungai Budi	Tidak Ada
20	PT Wilmar Bioenergi Indonesia	WINA Pelintung	Wilmar	Ada
21	PT Wilmar Nabati Indonesia	WINA Gresik	Wilmar	Ada

#### Politically Exposed Person (PEP)

*Politically Exposed Person* didefinisikan oleh *Financial Action Task Force* (FATF)<sup>6</sup> sebagai seseorang yang sedang atau telah diberikan kepercayaan atas fungsi publik. Fungsi publik tersebut dapat mencakup kepala negara, politisi senior, pejabat senior pemerintah, yudisial atau militer, eksekutif senior BUMN, pejabat penting partai. Karena posisi dan pengaruh yang mereka miliki, PEP berada pada posisi yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan

<sup>6</sup> [Financial Action Task Force. 2013. FATF Guidance: Politically Exposed Persons \(Recommendation 12 and 22\).](#)

melakukan tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana terkait lainnya seperti korupsi dan penyuapan, serta melakukan kegiatan yang terkait dengan pendanaan terorisme.

Rekomendasi FATF, PEP juga mencakup anggota keluarga dan *close associate*. *Close Associates* dapat meliputi pasangan di luar pernikahan, anggota dari parpol, organisasi sipil, rekan bisnis terutama yang berbagi kepemilikan manfaat atau terhubung melalui cara lain.<sup>7</sup>

Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC)<sup>8</sup> memperluas definisi PEP dengan menyatakan bahwa “pejabat publik” berarti:

1. Setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif atau yudikatif di suatu Negara Pihak, baik ditunjuk atau dipilih, baik tetap atau sementara, dibayar atau tidak dibayar, tanpa memandang senioritas orang tersebut;
2. Orang lain yang melaksanakan fungsi publik, termasuk badan publik atau perusahaan publik, atau yang menyediakan layanan publik, sebagaimana ditentukan dalam hukum domestik Negara Pihak tersebut dan sebagaimana diterapkan dalam wilayah hukum Negara pihak tersebut;
3. Orang lain yang didefinisikan sebagai “pejabat publik” menurut hukum domestik suatu Negara pihak.

Di Indonesia tidak ada pengaturan tegas tentang berapa lama pejabat publik yang telah pensiun dapat menjabat di perusahaan swasta. Pembatasan ini menjadi penting sebagai indikator supaya mantan pejabat publik tidak terindikasi sebagai PEP dalam perusahaan swasta.

Pentingnya pengungkapan PEP adalah untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tidak mendapatkan keistimewaan, dan tidak terjadinya konflik kepentingan. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan pejabat publik dalam satu perusahaan memberikan peluang yang besar terjadinya konflik kepentingan.

Pembatasan waktu bagi seseorang tidak disebut sebagai PEP, tidak diatur dalam regulasi yang ada, sehingga dalam penulisan ini, setiap orang yang teridentifikasi sebagai pejabat publik dan telah pensiun akan tetap disebutkan sebagai PEP dalam laporan ini, dengan memberikan catatan kapan mereka pensiun sebagai pejabat publik. Identifikasi PEP terhadap 310 perusahaan yang terafiliasi dengan 12 grup penerima subsidi biodiesel menggunakan data AHU, data penerima manfaat (BO) AHU, dan penelusuran lebih lanjut menggunakan sumber-sumber publik seperti media massa, jurnal, laporan resmi pemerintah, publikasi resmi perusahaan, profil perusahaan, dan media sosial.

#### **Identifikasi Regulasi dan Kebijakan Biodiesel di Indonesia**

Indonesia mulai mengeluarkan regulasi tentang pengembangan bahan bakar nabati sejak 1980 melalui pembentukan badan koordinasi nasional. Setidaknya terdapat 15 regulasi yang teridentifikasi mengacu pada pengembangan biodiesel. Regulasi-regulasi ini dimanfaatkan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini.

Tonggak pengembangan bahan bakar nabati diawali dengan keluarnya

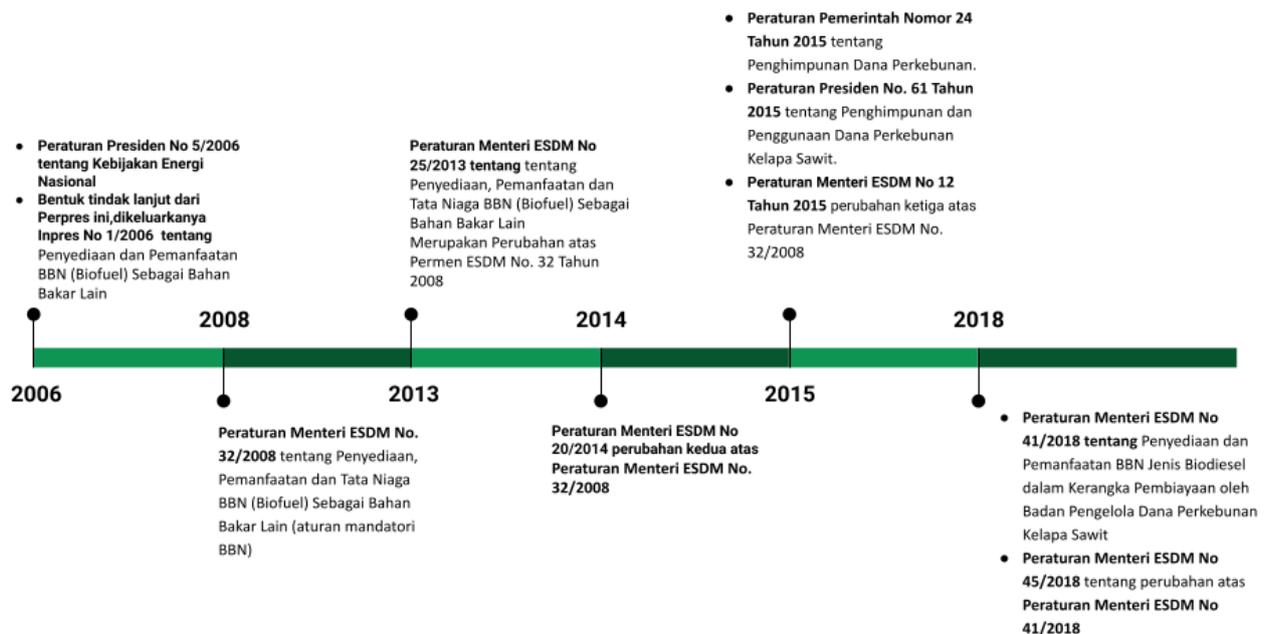
<sup>7</sup> [Bersihkan Indonesia, Pejabat Publik & Afiliasi Bisnis Energi.](#)

<sup>8</sup> [https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/Corruption\\_E.pdf](https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/Corruption_E.pdf)

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabat atau Biofuel sebagai bahan bakar lain. Kemudian dikembagkanlah biodiesel dengan memanfaatkan sawit sebagai bahan utamanya.

Diawali dengan pengumpulan regulasi dimulai dari tahun-tahun awal pengembangan biodiesel di Indonesia, yaitu 2006 hingga kebijakan yang berlaku hingga 2023. Secara umum kebijakan yang disebutkan dalam kajian ini berhubungan dengan pengembangan BBN untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, subsidi biodiesel, dan pembentukan badan atau organisasi yang berkaitan dengan biodiesel.

**Gambar 1.** Timeline regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan biodiesel.



## BAB IV. ANALISIS REGULASI DAN KEBIJAKAN BIODIESEL

Biodiesel diperbincangkan sejak 1970-an. Bahan bakar alternatif ini semakin mendapat perhatian ketika dunia mulai dilanda krisis minyak dunia dan muncul kesadaran bahwa energi fosil memberi pengaruh buruk bagi lingkungan melalui nilai emisinya. Di Indonesia, riset penggunaan biodiesel sebagai sumber energi alternatif mulai dikembangkan sejak 1990-an. Peneliti melakukan riset berbagai bahan baku seperti kelapa sawit, minyak jelantah, jarak pagar, dan minyak nabati lainnya.

Tahun 2005 dianggap sebagai titik balik “perjuangan kembali pengembangan biodiesel di Indonesia”. Saat itu Indonesia menghadapi dilema dimana harga bahan bakar minyak (BBM) naik lebih dari 100%, mencapai USD148 per barel dari sebelumnya USD60. Demi menjaga devisa, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi, yang diikuti dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati.

Melalui Perpres No. 5 Tahun 2006, pemerintah menargetkan penggunaan BBN sebesar 5% dari energi nasional pada 2025. Pada tahun yang sama pemerintah membentuk Tim Nasional Bahan Bakar Nabati (Timnas BBN). Tim ini dibentuk untuk mengembangkan *blueprint* dan *roadmap* pengembangan biofuel untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Timnas BBN menyelesaikan penyusunan *blueprint* biofuel pada 2008 dan disahkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2008.

Permen yang bersifat mandatori ini menargetkan pemenuhan biodiesel, bioethanol, dan BBN murni hingga 2025. Target pemenuhan ini dikenal dengan mandatori biodiesel. Kewajiban penggunaan biodiesel menurut Permen ini mencakup sektor transportasi *public sector obligation* (PSO)<sup>9</sup>, transportasi non-PSO, industri dan komersial, serta pembangkit listrik. Skema pembiayaan biodiesel ini pada awalnya berasal dari APBN, kemudian dialihkan menggunakan dana perkebunan sawit.

Sejak berlakunya mandatori ini, realisasi biodiesel perlahan mulai terlihat. Berdasarkan data ESDM, pada 2009 produksi biodiesel Indonesia telah mencapai 190 ribu kilo liter (KL) dan terus meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 3,9 juta KL pada 2014. Pada periode ini (2009-2014), skema pembiayaan biodiesel masih dibebankan kepada APBN. Meskipun tujuan awal pengembangan biodiesel untuk keamanan energi nasional, pada periode tersebut hanya 22% biodiesel yang diserap oleh pasar dalam negeri.

<sup>9</sup> *Public sector obligation* (PSO) adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik. PSO dapat berupa layanan transportasi, kesehatan, kelistrikan, dll. Di Indonesia, PSO umumnya dikelola oleh BUMN. Dalam konteks biodiesel sektor PSO yang dimaksud merupakan layanan transportasi publik seperti kendaraan umum, truk sampah, ambulance, dll.

**Tabel 3.** Realisasi biodiesel 2009 hingga 2022 berdasarkan ESDM.<sup>10</sup>

Tahun	Sumber Pendanaan	Produksi (Ribuan KL)	Ekspor (Ribuan KL)	Domestik (Ribuan KL)
2009	APBN	190	70	119
2010	APBN	243	20	223
2011	APBN	1.812	1.453	359
2012	APBN	2.221	1.552	669
2013	APBN	2.805	1.757	1.048
2014	APBN	3.961	1.629	1.845
2015	BPD PKS (PSO)	1.620	328	915
2016	BPD PKS (PSO)	3.656	477	3.008
2017	BPD PKS (PSO)	3.416	187	2.572
2018	BPD PKS (Semua Sektor)	6.168	1.803	3.750
2019	BPD PKS (Semua Sektor)	8.399	1.319	6.396
2020	BPD PKS (Semua Sektor)	8.594	36	8.400
2021	BPD PKS (Semua Sektor)	10.240	133	9.294
2022	BPD PKS (Semua Sektor)	11.836	372	10.449

Pada November 2013, Uni Eropa sebagai pasar ekspor utama Indonesia, menerapkan pungutan anti-dumping untuk biodiesel Indonesia. Sejak pemberlakuan anti-dumping tersebut jumlah ekspor biodiesel terus menurun. Terdapat beberapa faktor yang membuat Uni Eropa memberlakukan pajak anti-dumping bagi Indonesia, antara lain Indonesia mampu mengakses bahan baku sawit dengan harga yang lebih murah dan mudah, kemudian dengan adanya subsidi dari pemerintah harga biodiesel Indonesia dapat ditekan lebih rendah dari harga pasaran.

Besaran pungutan anti-dumping tersebut adalah sebesar 8,8% hingga 20,5% atau 76,94 euro hingga 178,85 euro untuk tiap ton biodiesel yang diimpor oleh Uni Eropa, kebijakan ini diterapkan sejak 2013 hingga 2017. Pada 2018 pungutan anti-dumping ini dicabut, setelah Indonesia memenangkan gugatan di *world trade organization* (WTO)<sup>11</sup>. Lalu diikuti oleh kebijakan Uni Eropa yang membatasi impor biodiesel dari Indonesia karena menganggap sumber bahan baku biodiesel Indonesia berhubungan dengan deforestasi<sup>12</sup>.

Di sisi lain, penyerapan biodiesel Indonesia masih sangat rendah karena harga biodiesel yang jauh lebih tinggi dibandingkan solar. Biodiesel yang lebih dikenal di pasaran sebagai biosolar subsidi pun terbatas bagi beberapa sektor penggunaan. Untuk mengatasi selisih harga ini, pemerintah memberikan insentif melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

<sup>10</sup> Kementerian Energi dan Sumberdaya Alam. 2022. Handbook of energy & economic statistics of Indonesia. [content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2022.pdf](https://www.esdm.go.id/content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2022.pdf) (esdm.go.id).

<sup>11</sup> [Indonesia wins appeal against EU over anti-dumping duty on biodiesel | Reuters](https://www.reuters.com/business/energy/indonesia-wins-appeal-against-eu-over-anti-dumping-duty-on-biodiesel-2018-12-11/)

<sup>12</sup> [EU imposes duties of up to 18 percent on Indonesian biodiesel - Business - The Jakarta Post](https://www.thejakartapost.com/business/2018/11/14/eu-imposes-duties-of-up-to-18-percent-on-indonesian-biodiesel/)

Diterbitkannya undang-undang tersebut menjadi tanda tanya di berbagai kalangan, pasalnya dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pembiayaan untuk biodiesel tak pernah disebutkan. Dalam undang-undang tersebut pembiayaan usaha perkebunan yang didapatkan dari pelaku usaha digunakan untuk: pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan; promosi perkebunan; peremajaan tanaman perkebunan; dan/atau sarana dan prasarana perkebunan. Pembiayaan untuk biodiesel barulah disebut dalam Perpres No. 61 Tahun 2015, dalam bentuk tambahan penjelasan sehingga pembiayaan dana sawit melingkupi pembiayaan bahan bakar nabati. Tujuan pembiayaan ini jugalah yang kemudian diadopsi dalam misi BPDPKS.

Dana perkebunan sawit berasal dari pungutan pajak ekspor dan bea keluar sawit. Dana ini dikelola oleh BPDPKS berupa Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan RI. Hingga 2023 sebesar 79% atau Rp146,56 triliun dana BPDPKS disalurkan untuk biodiesel<sup>13</sup>. Begitu pula dari sisi penguasaan industri biodiesel, pada 2023, industri biodiesel didominasi oleh grup-grup besar sawit. Dari 12 grup usaha penerima alokasi, 81% dari total alokasi dikelola oleh 6 grup usaha, yaitu Wilmar, Royal Golden Eagle (RGE), Musim Mas, KPN, Permata Hijau, dan Sinar Mas.

Penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku utama rasanya akan terus berkembang. Selain mandatori hingga 2025, biodiesel turut disebutkan dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)* sebagai salah satu upaya Indonesia dalam mencapai *Net Zero Emission (NZE)*. Dalam dokumen yang diproyeksikan hingga 2030 ini, implementasi penggunaan biofuel di sektor transportasi akan menggunakan sawit sebagai bahan baku utamanya. Kini pemerintah tengah mempersiapkan peningkatan bauran biodiesel, uji jalan B40 bahkan telah dilakukan pada 2022 lalu<sup>14</sup>. Sedangkan untuk 2024, pemerintah masih menggunakan B35 dengan menaikkan jumlah alokasi menjadi 13,4 juta KL<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> [Bos BPDPKS Blak-blakan Ungkap Alasan Biodiesel 'Anak Emas' \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com)

<sup>14</sup> [Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM](https://www.esdm.go.id)

<sup>15</sup> [ESDM Tetapkan Kuota Biodiesel B35 13,41 Juta untuk 2024 \(bisnis.com\)](https://www.bisnis.com)

## BAB V. JEJARING BIODIESEL INDONESIA

### Subsidi Biodiesel

Tantangan dalam pelaksanaan mandatori biodiesel adalah harga biodiesel yang saat itu lebih tinggi dari minyak diesel (solar). Untuk mendorong harga biodiesel menjadi kompetitif dibanding BBM kemudian pemerintah melalui dirjen Migas mengusulkan pemberian subsidi terhadap harga biodiesel. Usulan ini diterima oleh DPR melalui persetujuan, dan dialokasikan dalam anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN). Kebijakan Subsidi sempat dihentikan karena terjadi defisit perdagangan, sementara stok CPO melimpah dan harga sawit semakin turun.

Untuk mengatasi hal tersebut, pada 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Penghimpunan dana tersebut bertujuan untuk mendukung program sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional dengan salah satu produk yang dapat menyerap CPO dalam jumlah yang besar yaitu biodiesel.

### Penerima Subsidi Biodiesel Indonesia 2015-2023

Kementerian mulai menunjuk perusahaan produsen biodiesel sejak 2015 melalui surat keputusan menteri. Sebelum adanya penunjukan, catatan terkait produsen biodiesel masih sangat minim. Sebelum 2015, subsidi biodiesel dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kemudian subsidi biodiesel dialihkan menggunakan dana perkebunan sawit yang berasal dari pungutan pajak ekspor dan bea keluar. Dana ini kemudian dikelola oleh BPDPKS guna mengembangkan sawit secara berkelanjutan.

Target bauran biodiesel adalah 30% atau B30 pada 2025 sebagaimana yang diatur dalam Permen ESDM No. 12 Tahun 2015, namun pada 2023 realisasi bauran biodiesel Indonesia telah mencapai 35% atau B35. Signifikansi peningkatan bauran ini terlihat jelas pada 2018, pasca-perluasan subsidi biodiesel ke sektor non-PSO. Pemberian subsidi awalnya hanya mencakup sektor PSO (*Public Sector Obligation*)<sup>16</sup> hingga awal periode 2018. Kemudian pada Mei 2018, subsidi biodiesel mencakup seluruh sektor penggunaan biodiesel, baik PSO dan non-PSO. Data ESDM mencatat, produksi biodiesel pada 2017 sebesar 3,4 juta KL kemudian meningkat hampir 2 kali lipat pada 2018 menjadi 6,2 juta KL. Perluasan subsidi ini ditenggarai untuk meningkatkan daya beli masyarakat, serta menyerap sisa biodiesel pada tahun sebelumnya.

Sepanjang 2015 hingga 2023 tercatat 29 perusahaan yang mendapatkan subsidi biodiesel. Kini bahan bakar yang dikenal luas sebagai biosolar tersebut telah direalisasikan di Indonesia dan dapat dibeli secara umum untuk penggunaan harian, usaha skala kecil, dan berbagai sektor transportasi.

<sup>16</sup> PSO (*public sector obligation*) secara umum PSO diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik. PSO dapat berupa layanan transportasi, kesehatan, kelistrikan, dll. Di Indonesia, PSO umumnya dikelola oleh BUMN. Dalam konteks biodiesel sektor PSO yang dimaksud merupakan layanan transportasi publik seperti kendaraan umum, truk sampah, ambulance, dll.

**Tabel 4.** Perusahaan penerima alokasi biodiesel (warna oranye) sepanjang 2015-2023<sup>17</sup>.

No	Company Producer Name	Group	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023
1	Anugerah Inti Gemanusa	Eterindo Wahanatama tbk								
2	Batara Elok Semesta Terpadu	Best Industry								
3	Bayas Biofuels	Darmex Agro								
4	Cemerlang Energi Perkasa	Royal Golden Eagle								
5	Ciliandra Perkasa	First Resources								
6	Dabi Biofuels	Darmex Agro								
7	Darmex Biofuels	Darmex Agro								
8	Eco Prima Energi	Wings								
9	Energi Baharu Lestari	Bumitama Agri								
10	Energi Unggul Persada	KPN Corp								
11	Indo Biofuel Energy									
12	Intibenua Perkasatama	Musim Mas								
13	Jhonlin Agro Raya	Jhonlin								
14	Kutai Refinery Nusantara	Royal Golden Eagle								
15	LDC Indonesia	Louis Dreyfus								
16	Multi Nabati Sulawesi	Wilmar								
17	Multimas Nabati Asahan	Wilmar								
18	Musim Mas	Musim Mas								
19	Pelita Agung Agrindustri	Permata Hijau								
20	Permata Hijau Palm Oleo	Permata Hijau								
21	Prima Nusa Palma Energi									
22	Sari Dumai Oleo	Royal Golden Eagle								
23	Sari Dumai Sejati	Royal Golden Eagle								
24	Sinarmas Bio Energy	Sinar Mas								
25	SMART Tbk	Sinar Mas								
26	Sukajadi Sawit Mekar	Musim Mas								
27	Tunas Baru Lampung	Sungai Budi								
28	Wilmar Bioenergi Indonesia	Wilmar								
29	Wilmar Nabati Indonesia	Wilmar								

Sepanjang 2015 - 2022 total volume biodiesel yang tersalurkan sebesar 42,98 juta KLDengan jumlah subsidi sekitar Rp 144,59 triliun<sup>18</sup>. Pada 2023 anggaran subsidi biodiesel sebesar Rp35 triliun<sup>19</sup>, sehingga total subsidi sampai 2023 sekitar Rp179 triliun. Daftar grup usaha penerima subsidi biodiesel dapat dilihat pada tabel 6.

<sup>17</sup>Daftar nama perusahaan diperoleh dari Keputusan Menteri ESDM Tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak Dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dan Alokasi Volumennya untuk periode 2015-2022.

<sup>18</sup>Laporan Tahunan 2022 Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

<sup>19</sup>[BPDPKS Siapkan Anggaran Rp 35 T Buat Insentif Harga Biodiesel.](#)

**Tabel 5.** Grup penerima manfaat subsidi biodiesel 2015 - 2023<sup>20</sup>.

No	Grup Perusahaan	Dana Subsidi (Rp miliar)
1	Wilmar	56.610
2	Musim Mas	26.469
3	Royal Golden Eagle	21.314
4	Permata Hijau	14.918
5	Sinar Mas	14.036
6	Darmex Agro	10.714
7	KPN Agro	7.552
8	Louis Dreyfus	6.824
9	Sungai Budi	6.447
10	Best Grup	5.382
11	First Resources	4.732
12	Jhonlin	1.860
13	Wings	1.695
14	Bumitama Gunajaya Agro	337
15	Eterindo Wahanatama	12
16	Alokasi Cadangan	416

Subsidi biodiesel sendiri diberikan pada seluruh perusahaan yang memproduksi biodiesel dan memenuhi syarat administrasi dan produknya memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Kementerian ESDM<sup>21</sup>. Syarat penetapan produsen biodiesel atau yang disebut pemerintah sebagai badan usaha BBN diatur dalam Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2018<sup>22</sup>. Dalam permen tersebut disebutkan bahwa Badan Usaha BBN harus menyerahkan permohonan kepada Dirjen EBTKE dengan syarat yang perlu dipenuhi.

Syarat tersebut berupa bukti bahwa biodiesel yang diproduksi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan dapat menjamin pemenuhan biodiesel dalam negeri secara berkesinambungan. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2018 pula, terdapat tim evaluasi pengadaan BBN yang memiliki tanggung jawab mengevaluasi produsen biodiesel serta memberikan rekomendasi kepada menteri melalui Dirjen EBTKE. Hal ini pula yang menjadikan ESDM memegang kendali penuh terhadap pemenuhan biodiesel di Indonesia.

<sup>20</sup>Perhitungan dana subsidi yang diterima setiap grup usaha diperoleh dari dana yang direalisasikan oleh BPDPKS setiap tahun untuk subsidi biodiesel kemudian dibagi dengan total alokasi yang telah ditetapkan pemerintah di masing-masing tahun. Kemudian dikalikan dengan besaran alokasi volume yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan.

<sup>21</sup>[BPDPKS dan Produsen Biodiesel Tandatangan Perjanjian Pembiayaan Insentif Biodiesel untuk 2020 - Beranda](#)

<sup>22</sup>Permen ESDM no. 45 tahun 2018 merupakan Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam permen tersebut badan usaha BBN ditunjuk secara langsung.

**Tabel 6.** Keputusan menteri ESDM terkait penunjukan alokasi biodiesel.

Kepmen ESDM	Periode	Alokasi Campuran	Jumlah Produsen
No. 208.K/EK.05/DJE/2022	Januari - Desember 2023	B35 (Februari dst) & B30 (Januari)	21 Perusahaan
No. 160.K/EK.05/DJE/2022 (Perubahan Kedua Atas Kepmen No. 150.K/EK.05/DJE/2021)	Januari - Desember 2022	B30	23 Perusahaan
No. 252.K/10/MEM/2020	Januari - Desember 2021	B30	20 Perusahaan
No. 195 K/10/MEM/2020 (Perubahan Kedua atas Kepmen No. 199 K/20/MEM/2019)	Januari - Desember 2020	B30	18 Perusahaan
No. 227 K/10/MEM/2019	Januari - Desember 2019	Ujicoba B30	10 Perusahaan
No. 3756 K/10/MEM/2017	November 2017 - April 2018	B20	19 Perusahaan
No. 258 K/12/DJE/2016	Mei - Oktober 2016	B20	15 Perusahaan
No. 951 K /12/DJE/2015	November 2015 - April 2016	B20	10 Perusahaan

Sejalan dengan meningkatnya tingkat bauran, jumlah perusahaan biodiesel juga ikut bertambah, kecuali pada 2019 ketika Pandemi COVID-19, pada 2019 sebanyak 8 dari 18 perusahaan tidak menerima subsidi, kemudian mendapatkan kembali subsidi pada periode 2020. Sejak periode 2022, terdapat penambahan 5 perusahaan baru yang ditetapkan sebagai produsen biodiesel yang berasal dari Wings Grup (PT Eco Prima Energi), Jhonlin Agro (PT Jhonlin Agro Raya), Wilmar (PT Multimas Nabati Asahan), dan Royal Golden Eagle (PT Sari Dumai Oleo dan PT Sari Dumai Sejati).

**Tabel 7.** Perusahaan penerima alokasi biodiesel yang ditunjuk melalui Kepmen ESDM No. 208.K/EK.05/DJE/2022.

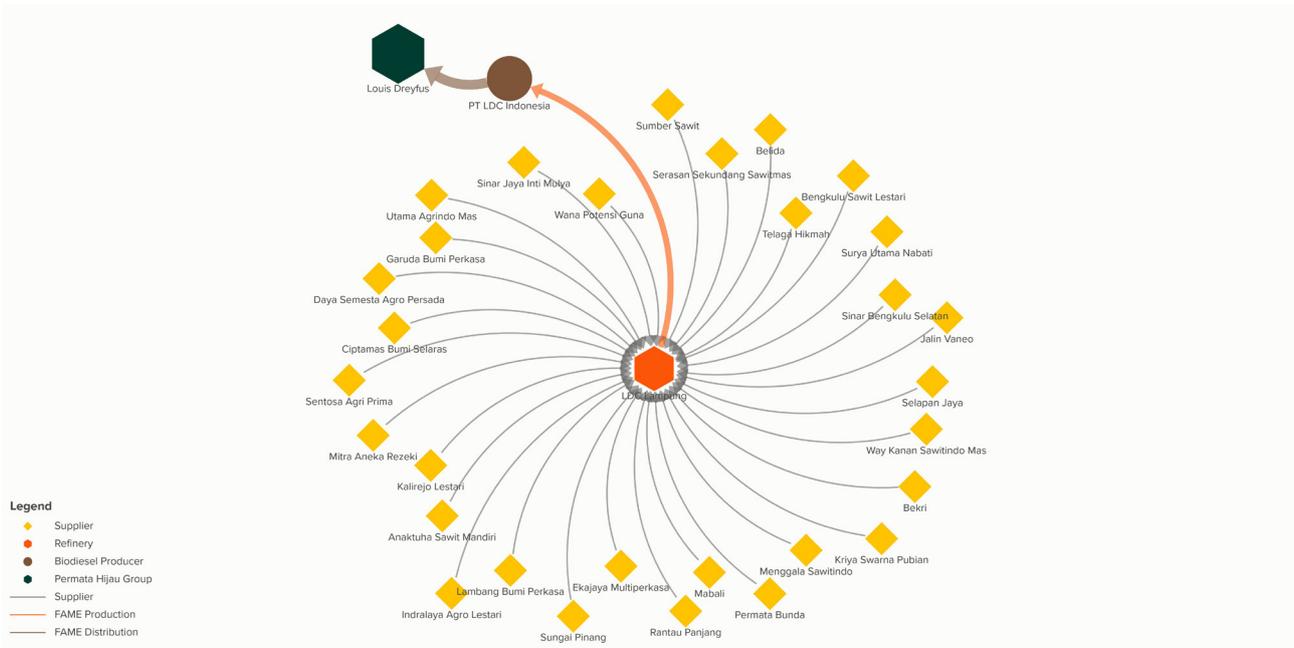
No	Perusahaan	Nama Kilang	Lokasi Kilang		Grup	Alokasi (kL)
			Provinsi	Kabupaten		
1	PT Batara Elok Semesta Terpadu	Batara Elok Semesta Terpadu (Gresik)	Jawa Timur	Gresik	Best Industry	468.929
2	PT Ciliandra Perkasa	Ciliandra Perkasa Refinery	Riau	Kota Dumai	First Resources	283.935
3	PT Eco Prima Energi	Eco Prima Energi Refinery	Jawa Timur	Gresik	Wings	483.771
4	PT Energi Unggul Persada	Energi Unggul Persada Refinery Site Bontang	Kalimantan Timur	Kota Bontang	KPN Corp	1.221.962
5	PT Intibenua Perkasatama	IBP-LGNG	Riau	Kota Dumai	Musim Mas	287.875
6	PT Jhonlin Agro Raya	Jhonlin Agro Raya Refinery	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	Jhonlin	330.269
7	PT Kutai Refinery Nusantara	Kutai Refinery Nusantara	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Royal Golden Eagle	1.016.667
8	PT LDC Indonesia	Louis Dreyfus Commodities Lampung	Lampung	Kota Bandar Lampung	Louis Dreyfus	386.926
9	PT Multi Nabati Sulawesi	MNS Bitung	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Wilmar	350.29

No	Perusahaan	Nama Kilang	Lokasi Kilang		Grup	Alokasi (kL)
			Provinsi	Kabupaten		
10	PT Multimas Nabati Asahan	MNA Serang	Banten	Serang	Wilmar	500.4
11	PT Musim Mas	MM-BTM	Kepulauan Riau	Kota Batam	Musim Mas	1.045.210
		MM-KIM 2	Sumatera Utara	Deli Serdang	Musim Mas	
12	PT Pelita Agung Agrindustri	Pelita Agung Agrindustri Simpang Bako	Riau	Bengkalis	Permata Hijau	789.341
		Pelita Agung Agrindustri Pelintung	Riau	Kota Dumai	Permata Hijau	
13	PT Permata Hijau Palm Oleo	Permata Hijau Palm Oleo	Sumatera Utara	Kota Medan	Permata Hijau	412.274
14	PT Sari Dumai Oleo	Sari Dumai Oleo	Riau	Kota Dumai	Royal Golden Eagle	400.688
15	PT Sari Dumai Sejati	Sari Dumai Sejati Refinery	Riau	Kota Dumai	Royal Golden Eagle	613.299
16	PT Sinarmas Bio Energy	Marunda Refinery	Jawa Barat	Bekasi	Sinar Mas	364.617
17	PT SMART Tbk	Tarjun Refinery	Kalimantan Selatan	Kotabaru	Sinar Mas	699.1
18	PT Sukajadi Sawit Mekar	SSM-BGD	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Musim Mas	281.833
19	PT Tunas Baru Lampung	Tunas Baru Lampung - Lampung	Lampung	Kota Bandar Lampung	Sungai Budi	397.51
20	PT Wilmar Bioenergi Indonesia	WINA Pelintung	Riau	Kota Dumai	Wilmar	1.155.942
21	PT Wilmar Nabati Indonesia	WINA Gresik	Jawa Timur	Gresik	Wilmar	1.501.223
22	Alokasi Cadangan					156.531
<b>Total</b>						<b>13.148.592</b>

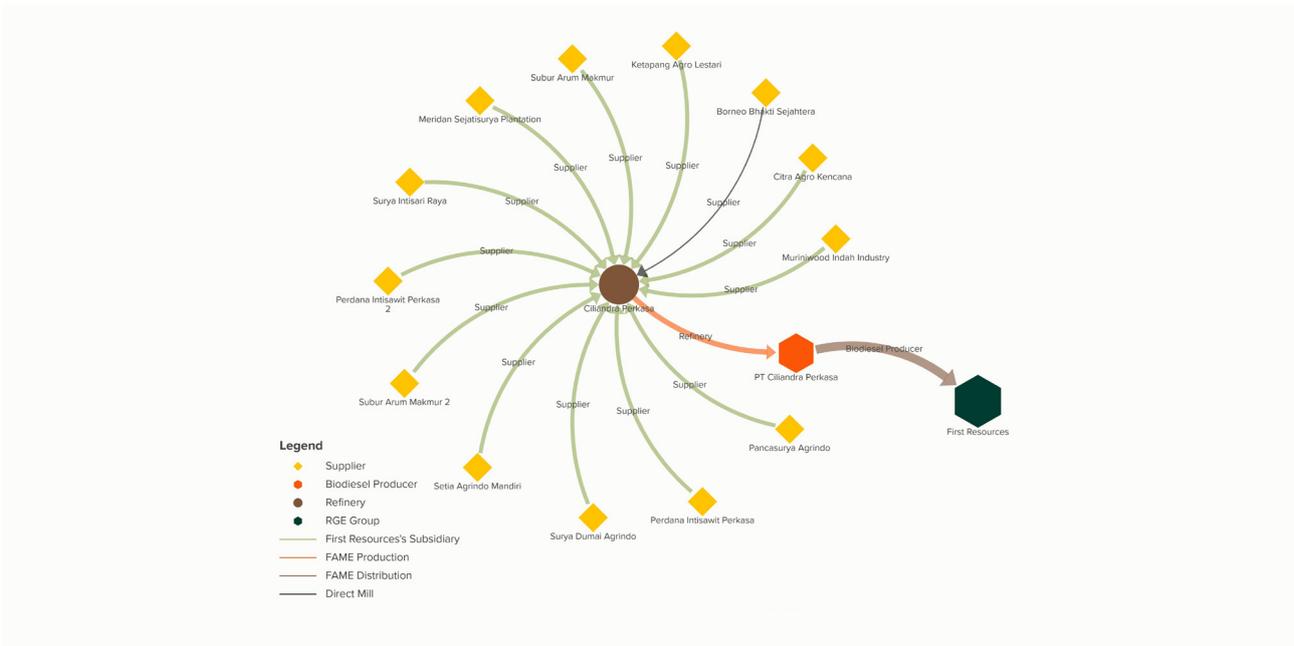
Pada 2023, Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral menetapkan 21 perusahaan produsen biodiesel untuk pencampuran bahan bakar minyak jenis solar. 21 perusahaan tersebut berasal dari 12 kelompok perusahaan besar sawit di Indonesia. Bahan baku yang dibutuhkan untuk biodiesel adalah *Crude Palm Oil (CPO)*. Minyak sawit tersebut berasal dari pabrik kelapa sawit yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia.

Saat ini, belum ada laporan ketelusuran rantai pasok yang memisahkan sumber CPO untuk biodiesel dan untuk industri lainnya. Dengan begitu rantai pasok biodiesel terkait erat dengan rantai pasok sawit pada umumnya. Perbedaan dari kedua rantai pasok ini adalah kebutuhan jenis minyak yang digunakan. Biodiesel hanya menggunakan CPO atau minyak yang dihasilkan dari bagian buah sawit, bagian mesocarp-nya saja, sedangkan PKO yang dihasilkan dari inti sawit tidak digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Dengan menganalisis rantai pasok tiap perusahaan biodiesel dan mengecualikan perusahaan yang hanya mengirimkan PKO ke *refinery*, maka rantai pasok biodiesel dapat pula dipetakan sebagai berikut.

**Gambar 2.** Rantai Pasok Biodiesel PT LDC Indonesia<sup>23</sup> dengan jumlah perusahaan pemasok sebanyak 30 perusahaan.



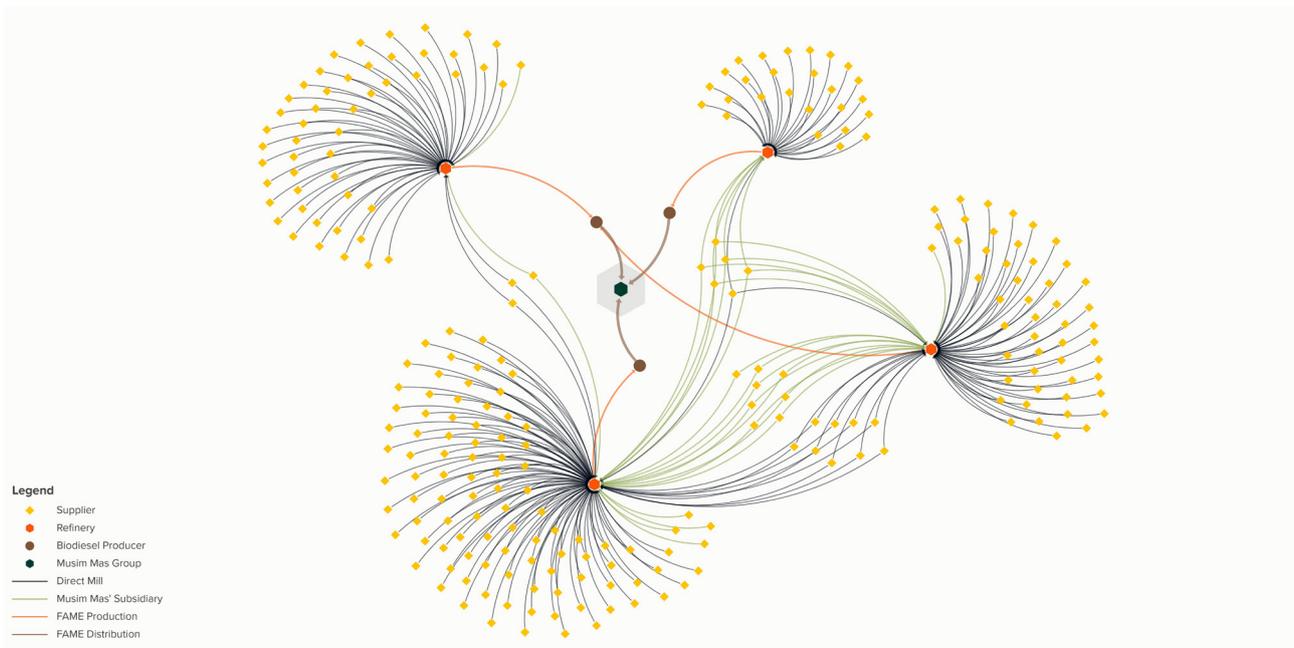
**Gambar 3.** Rantai Pasok Biodiesel PT Ciliandra Perkasa<sup>24</sup> (First Resources Grup) dengan jumlah perusahaan pemasok sebanyak 13 perusahaan.



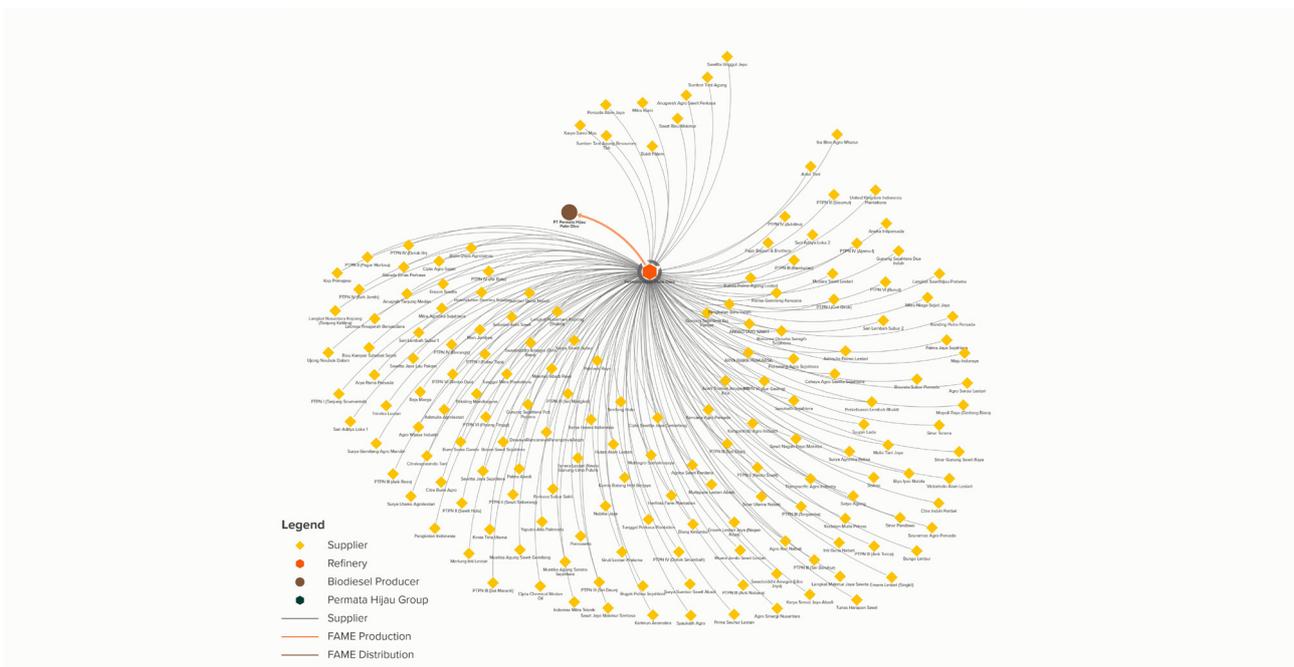
<sup>23</sup> [Rantai Pasok Biodiesel PT LDC Indonesia](#)

<sup>24</sup> [Rantai Pasok Biodiesel PT Ciliandra Perkasa](#)

**Gambar 4.** Rantai Pasok Biodiesel dalam grup Musim Mas<sup>25</sup> dengan jumlah perusahaan pemasok sebanyak 283 perusahaan.



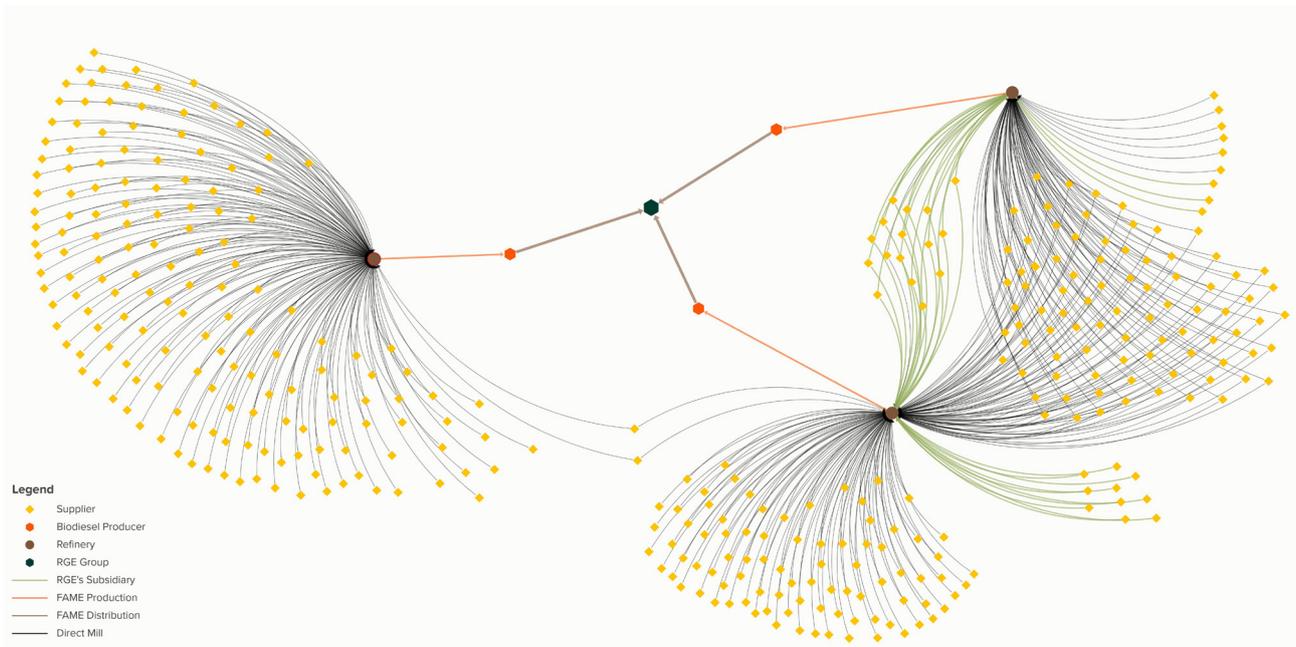
**Gambar 5.** Rantai Pasok Biodiesel dalam grup Permata Hijau<sup>26</sup> dengan jumlah perusahaan pemasok sebanyak 203 perusahaan.



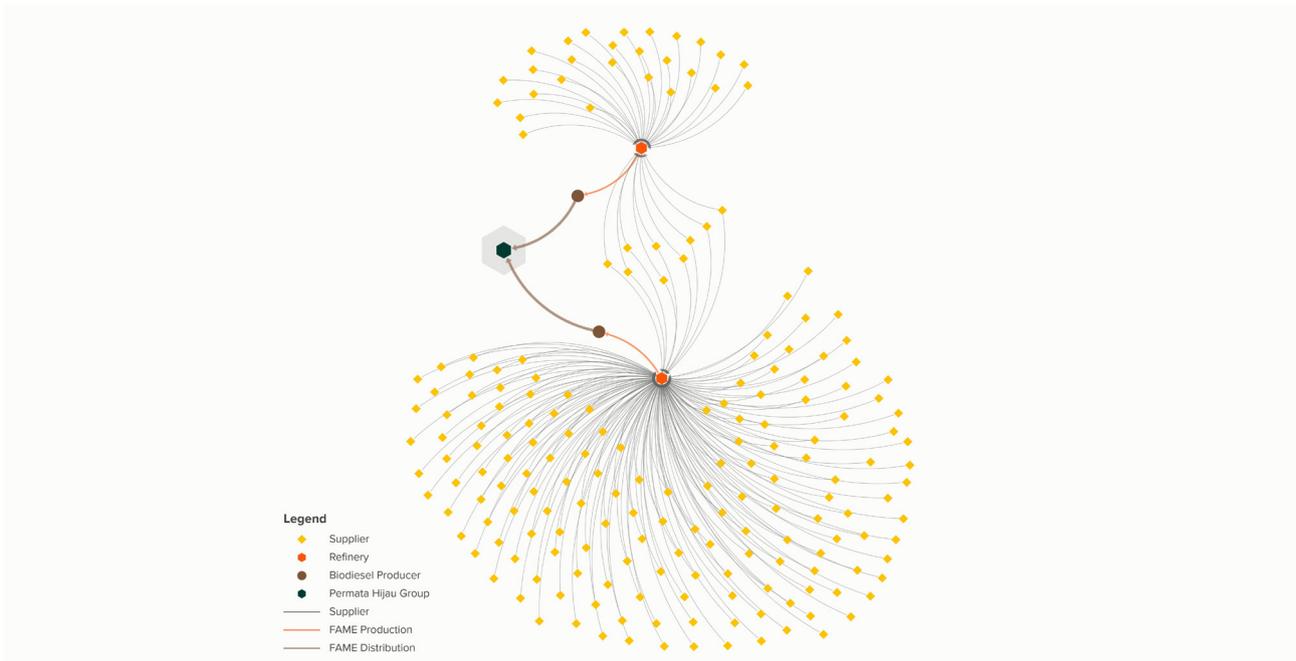
<sup>25</sup> [Rantai Pasok Biodiesel Dalam Musim Mas Grup](#)

<sup>26</sup> [Rantai Pasok Biodiesel dalam Permata Hijau Grup](#)

**Gambar 6.** Rantai Pasok Biodiesel dalam grup Royal Golden Eagle<sup>27</sup> dengan jumlah perusahaan pemasok sebanyak 477 perusahaan.



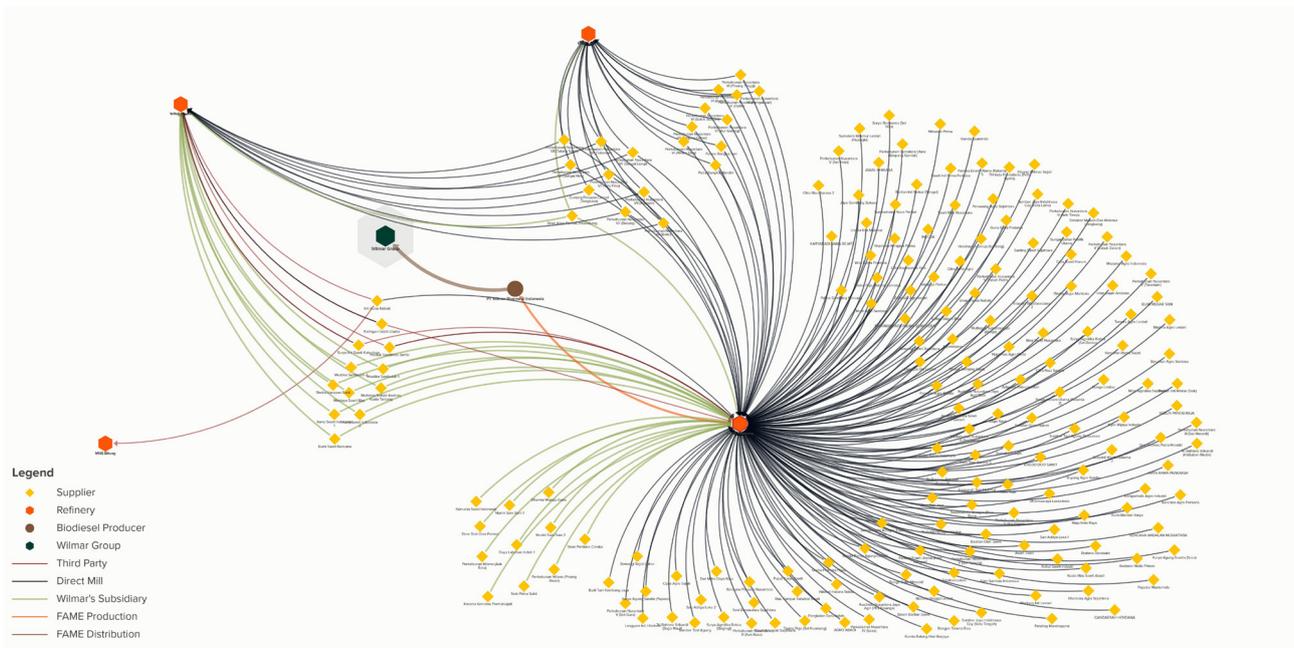
**Gambar 7.** Rantai Pasok Biodiesel dalam grup Sinar Mas<sup>28</sup> dengan jumlah perusahaan pemasok sebanyak 132 perusahaan.



<sup>27</sup> [Rantai Pasok Biodiesel dalam Grup Royal Golden Eagle](#)

<sup>28</sup> [Rantai Pasok Biodiesel dalam Grup Sinar Mas](#)

**Gambar 8.** Rantai Pasok Biodiesel dalam grup Wilmar<sup>29</sup> dengan jumlah perusahaan pemasok sebanyak 386 perusahaan.



Berdasarkan analisis rantai pasok atas perusahaan biodiesel, maka dapat dilihat bahwa industri biodiesel sebenarnya adalah industri sawit. Selain PT Ciliandra Perkasa yang berada di bawah First Resources Grup, mayoritas CPO yang diterima *refinery* berasal dari pihak ketiga atau *mill* yang bukan anak usaha dari grup tersebut. CPO untuk biodiesel Indonesia berasal dari 902 mill dari 25 provinsi. Mayoritas *mill* pemasok CPO tersebut berada di Sumatera (63%) dan Kalimantan (34%), sedangkan hanya sebagian kecil saja (3%) yang berasal dari Sulawesi, Papua, dan Jawa.

Industri biodiesel sebenarnya disokong oleh hampir seluruh wilayah bersawit di Indonesia, tidak hanya oleh grup besar penerima subsidi. Meskipun hingga kini keterlibatan tersebut belum bisa dihitung secara jelas, sebab distribusi sawit untuk biodiesel tidak disebutkan dalam laporan rantai pasok manapun.

Akibatnya insentif biodiesel ini hanya berputar di tingkat produsen atau *refinery*. Padahal sumber dari insentif yang digunakan oleh biodiesel berasal dari penarikan pajak ekspor CPO yang dihasilkan oleh kebun sawit Indonesia. Sudah selayaknya insentif tersebut harusnya kembali ke pemilik CPO, bukan hanya dinikmati oleh produsen biodiesel.

#### Politically Exposed Person (PEP) di Jejaring Biodiesel Indonesia

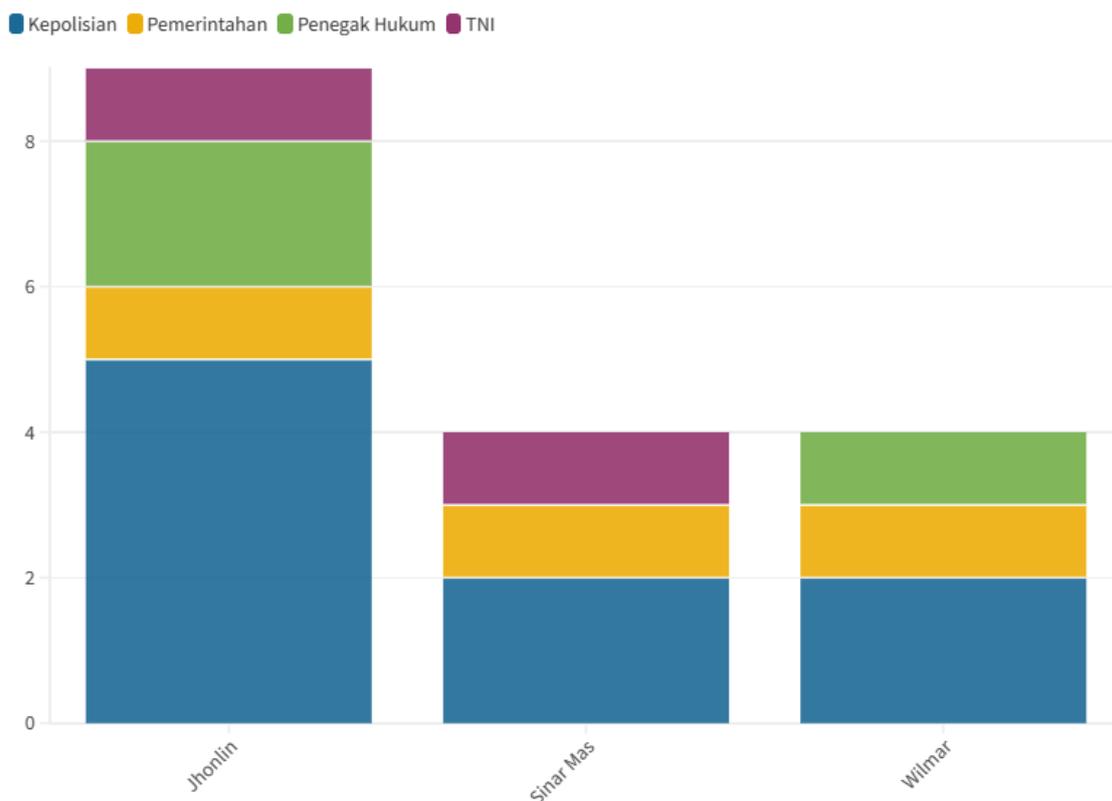
PEP yang diidentifikasi dalam kajian ini tidak hanya berasal dari perusahaan produsen biodiesel, namun dari seluruh anak usaha maupun perusahaan

<sup>29</sup> [Rantai Pasok Biodiesel dalam Grup Wilmar](#)

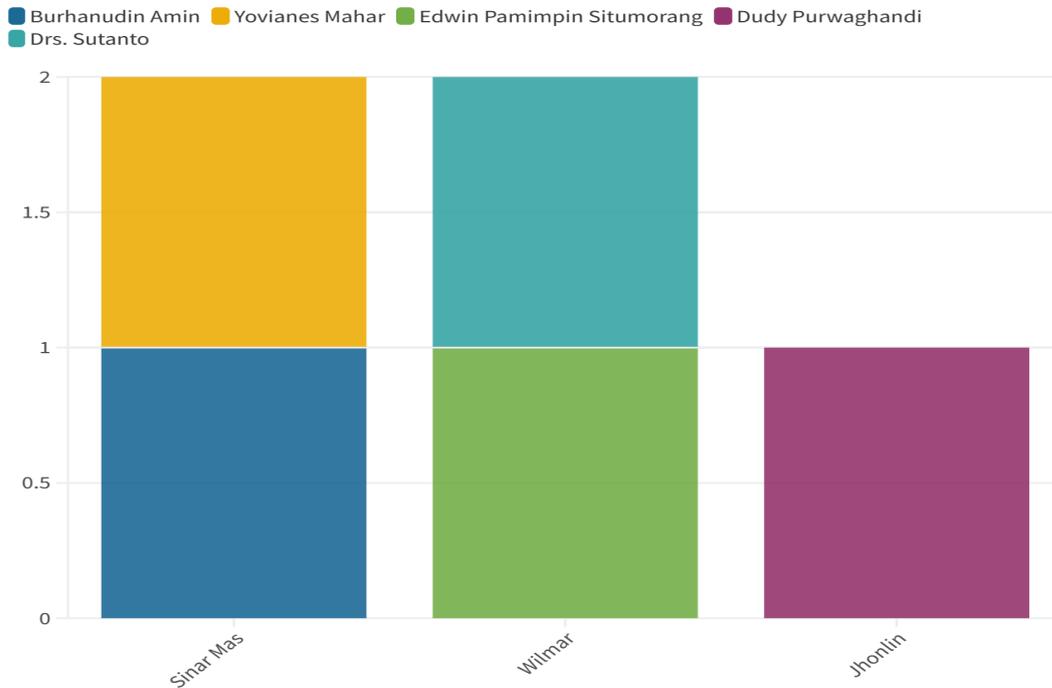
yang terafiliasi dengan Grup Usaha Biodiesel. Meski bukan pemilik manfaat dari produsen biodiesel, perusahaan yang teridentifikasi memiliki PEP diindikasikan sebagai bagian dari rantai pasok biodiesel.

Melalui penelusuran *beneficial owner* pada 12 grup usaha yang menaungi perusahaan biodiesel, teridentifikasi 17 orang sebagai PEP, dua orang di antaranya memiliki riwayat dari beberapa jabatan di instansi yang berbeda. Jabatan publik yang paling banyak ditemukan berasal dari instansi kepolisian sebanyak 9 orang, kemudian disusul oleh pejabat pemerintahan termasuk pejabat di BUMN sebanyak 3 orang, Penegak hukum dengan jabatan hakim, jaksa, atau petinggi lembaga peradilan sebanyak 3 orang, dan pejabat TNI 2 orang.

**Gambar 9.** Jumlah Kategori PEP yang teridentifikasi di Grup Usaha Biodiesel.



Hanya 3 dari 12 grup usaha yang teridentifikasi memiliki PEP sebagai pemilik manfaat maupun pengurus perusahaan. PEP terbanyak ditemukan di Jhonlin Grup (9 orang), Sinar Mas (4 orang), dan Wilmar (4 orang). Kategori PEP di masing-masing perusahaan dapat dilihat pada gambar 8. Tidak hanya itu, 5 orang PEP merupakan bagian dari Tim Pemenangan atau Tim Sukses dalam pemilihan presiden pada 2019 dan 2024 (gambar 10).

**Gambar 10.** Jumlah orang yang terkait dengan tim pemenang dalam pemilihan presiden.

Rincian PEP yang tercatat dalam dokumen AHU perusahaan setiap grup adalah sebagai berikut:



#### SINAR MAS

Sinar Mas ditunjuk sebagai produsen biodiesel oleh ESDM sejak 2016 melalui SMART Tbk, kemudian pada 2017 Sinarmas Bio Energi juga ditunjuk sebagai produsen biodiesel. Total alokasi biodiesel yang diberikan untuk Sinar Mas sendiri sebesar 4 juta KL biodiesel atau sebesar 8,5% dari total alokasi biodiesel sepanjang 2015-2023. Sejak ditunjuknya Sinar Mas menjadi produsen biodiesel oleh pemerintah Indonesia, dana subsidi yang diterima grup usaha ini sekitar Rp14 triliun. Dari analisis terhadap pemilik manfaat dan pemegang jabatan yang tercatat pada dokumen AHU Kemenkumham yang diakses pada 2023, ditemukan 5 orang yang teridentifikasi sebagai PEP:

#### Burhanudin Amin



Berdasarkan data AHU Kemenkumham Tahun 2020 Burhanudin Amin tercatat sebagai Direktur Utama di PT Sinar Kencana Inti Perkasa dan PT Tapian Nadenggan, kedua perusahaan ini terafiliasi dengan Sinar Mas Grup. Burhanudin Amin merupakan purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI. Burhanudin pernah menjabat sebagai Pangkostrad dari 17 Februari 2010 hingga 30 September 2010 dan pensiun pada 5 November 2010. 20 Januari 2012 Burhanudin diangkat sebagai Komisaris Utama PT

Pupuk Pusri (BUMN) dengan masa jabatan 5 tahun.<sup>30</sup> Berdasarkan pelaporan tim kampanye pemilu 2024, Burhanudin tercatat sebagai tim kampanye Anies-Imin (Pasangan No. 01).<sup>31</sup>



### Carel Risakotta

Penelusuran melalui data AHU yang diakses pada 2023, Carel Risakotta setidaknya terdaftar di 32 perusahaan, dengan jabatan komisaris dan komisaris utama. Perusahaan-perusahaan tersebut terafiliasi dengan Sinar Mas Grup. Sebagian besar merupakan bagian dari rantai pasok biodiesel. Sejak 2011 Carel Risakotta sudah menjadi komisaris di empat anak perusahaan Sinar Mas yaitu PT Satya Kisma Usaha, PT Kresna Duta Agroindo, PT Maskapai Perkebunan Leidong West, dan PT Tapian Nadenggan<sup>32</sup>. Carel Risakotta merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal dan pensiun pada 2008. Pada 2005-2008 ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jambi<sup>33</sup> dan pada 14 Januari 2008 diangkat sebagai Kepala Biro Bimbingan Masyarakat Deputy Operasi Kapolri.<sup>34</sup>



### Suedi Husein

Suedi Husein merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal. Selama di kepolisian, ia pernah menduduki jabatan Penyidik Utama Tk.II Dit. III/Tipikor Bareskrim Polri, Direktur Penyidikan KPK (2009-2010),<sup>35</sup> Kapolda Riau (2010),<sup>36</sup> Kasespimmen Sespim Polri Lemdikpol (2013), dan terakhir sebelum pensiun ia menjabat sebagai Deputy bidang pemberdayaan masyarakat BNN pada 2016. Pada 2018 dalam acara Bazar Pasar Murah Ramadhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Sinar Mas, Suedi Husein hadir sebagai salah satu petinggi dari Sinar Mas.<sup>37</sup> Penelusuran melalui data AHU pada 2023, ternyata Suedi menjabat sebagai direktur utama dan wakil direktur utama di 27 perusahaan yang terafiliasi dengan Sinar Mas Grup.

<sup>30</sup> [Burhanudin Amin Komisaris Utama PT Pusri Palembang](#)

<sup>31</sup> [Deretan Purnawirawan Jenderal di Barisan Anies-Muhaimin](#)

<sup>32</sup> [Dokumen Prospektus Obligasi SMART 2012](#)

<sup>33</sup> [Sejak Tahun 1996, Polda Jambi Telah Dijabat Oleh 20 Perwira, Ada yang Anak Wapres ke-6 \(disway.id\)](#)

<sup>34</sup> [Kombes Rumiah Resmi Jadi Wanita Kapolda Pertama - ANTARA News](#)

<sup>35</sup> [Dirdik Dan Kahumas KPK Dilantik. Suedi Husein pernah diisukan terlibat dalam upaya menghambat penyidikan kasus korupsi Anggodo \(Direktur Penyidikan KPK Bantah Hambat Kasus Anggodo\)](#)

<sup>36</sup> [Gara-Gara Kecelakaan, Kapolda Ini Dicapot?](#)

<sup>37</sup> [Sinar Mas Serahkan 10 Ribu Waqaf Al-Quran](#)



di media sebagai Dewan Komisaris Wilmar,<sup>40</sup> berdasarkan persetujuan perubahan anggaran dasar PT Mustika Sembuluh 11 Oktober 2019, nama Drs. Nanan Soekarna tercatat sebagai komisaris. PT Mustika Sembuluh yang merupakan *supplier* dari PT Wilmar Bioenergi Indonesia. PT Mustika Sembuluh tercatat sebagai anak usaha Wilmar.<sup>41</sup>



### **Drs. Sutanto**

Drs Sutanto merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak 8 Juli 2005 hingga 30 September 2008. Purnawirawan dengan pangkat terakhir Jenderal Polisi ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Indonesia sejak tahun 22 Oktober 2009 hingga 19 Oktober 2011. Sutanto juga pernah menjadi Ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1995-1998. Setelah melepas jabatan publik, nama Sutanto tercatat sebagai komisaris utama/presiden komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia sejak tahun 2012 sampai dengan 2022.<sup>42</sup> Berdasarkan pelaporan tim kampanye pemilu 2024, Drs. Sutanto merupakan Ketua Dewan Penasihat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pasangan Prabowo dan Gibran (Paslon no urut 2).<sup>43</sup>



### **Edwin Pamimpin Situmorang**

Tercatat sebagai komisaris di PT AMP Plantation pada dokumen AHU 2020. PT AMP Plantation terafiliasi dengan Wilmar melalui kepemilikan sahamnya. Edwin Pamimpin Situmorang purnatugas pada 2012<sup>44</sup>, telah berkarir di Kejaksaan sejak 1979 dengan jabatan terakhir, Jaksa Agung Muda Intelijen. Ia banyak membidangi intelijen dan perundang-undangan semasa tugas<sup>45</sup>. Pada 2008 Ia pernah menjabat sebagai Deputy Menko Polhukam Bidang Koordinasi Hukum dan HAM<sup>46</sup>.

Pada 2014 Edwin Pamimpin Situmorang mencalonkan diri sebagai DPRD Sumut II namun tidak terpilih lewat Partai Nasdem.<sup>47</sup> Kembali mencalonkan diri sebagai DPR RI Sumut I dari partai Nasdem pada pemilihan 2024 nanti.<sup>48</sup> Pada 2019 ia menyatakan dukungannya terhadap pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin pada pemilu kala itu<sup>49</sup>, kemudian pada pemilu 2024 ia didapuk sebagai Dewan Pengarah Tim Hukum dan Advokasi oleh pasangan Anies dan Muhaimin (Paslon no 1).<sup>50</sup>

<sup>40</sup> [Heboh Sederet Nama Jenderal Komisaris Wilmar Di Sosmed diakses pada 3 Feb 2024, pukul 00.42 Wib. \(pencarian lebih lanjut Nanan Soekarna di Laporan-laporan Wilmar tidak ditemukan.](#)

<sup>41</sup> [Laporan keterlacakan PT Wilmar Nabati Indonesia](#)

<sup>42</sup> Data AHU kementerian hukum dan HAM, diakses pada 1 Januari 2023.

<sup>43</sup> [Struktur Lengkap Tim Pemenangan Prabowo - Gibran, Ada Pengusaha, Politikus Hingga Jenderal - Bisnis Tempo.co](#)

<sup>44</sup> [Pekan Ini, Jamintel dan Jampidsus Kejagung Diganti - News Liputan6.com](#)

<sup>45</sup> [Edwin Pamimpin Situmorang - TOKOH INDONESIA | TokohIndonesia.com | Tokoh.id](#)

<sup>46</sup> [Edwin Pamimpin Situmorang - TOKOH INDONESIA | TokohIndonesia.com | Tokoh.id](#)

<sup>47</sup> [KBR :: KENALI CALEG - Detail](#)

<sup>48</sup> [Nama Caleg DPR RI 2024 Dapil Sumut 1 dari Nasdem, Ada Anak Ketum Surya Paloh - Tribunpadang.com \(tribunnews.com\)](#)

<sup>49</sup> [Facebook: Edwin Pamimpin Situmorang](#)

<sup>50</sup> [Eks Jaksa Agung Jadi Dewan Pengarah Tim Hukum Anies-Muhaimin \(tirto.id\)](#)



### Dr. Master Parulian Tumanggor

Merupakan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia sejak 2009 yang merupakan produsen biodiesel. Ia juga merupakan ketua dari Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI). Ia pernah menjabat sebagai Bupati Dairi, Sumatera Utara sejak 1999 hingga 2009. Sebelumnya Ia pernah menjabat sebagai pejabat eselon II di Kantor Menteri Negara BUMN dan tenaga pengajar di Departemen Keuangan.<sup>51</sup> Anaknya, Franc Bernhard Tumanggor merupakan Bupati Phak-Phak Barat yang berasal dari Partai Golkar, menjabat sejak 2021.<sup>52 53</sup>



### JHONLIN GROUP

Jhonlin mendapatkan alokasi biodiesel melalui PT Jhonlin Agro Raya sejak 2022. Total alokasi biodiesel perusahaan ini sebesar 643 ribu KL atau sebesar 2,7% dari total alokasi biodiesel pada 2022 dan 2023. Perusahaan biodiesel Jhonlin berbasis di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Total subsidi yang diterima Jhonlin sejak mulai ditunjuknya sebagai produsen biodiesel sekitar Rp1,8 triliun. Dari analisis terhadap pemilik manfaat dan pemegang jabatan pada dokumen AHU kemenkumham yang diakses pada 2023, ditemukan bahwa terdapat 9 orang memiliki riwayat sebagai pejabat publik/pernah menjadi pejabat publik.



### Agung Budi Maryoto

Salah satu anak usaha Jhonlin Group adalah PT Ehsan Agro Sentosa.<sup>54</sup> Berdasarkan akta perubahan perusahaan No. 12 tertanggal 10 Oktober 2023, yang terdapat di AHU, terdapat nama Agung Budi Maryoto yang menjabat sebagai komisaris. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut nama Agung Budi Maryoto identik dengan nama mantan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan periode 2015-2016, dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan periode 2016-2017.<sup>55</sup> Agung Budi merupakan Polisi dengan pangkat Komjen menduduki jabatan terakhir sebagai Inspektur Pengawasan Umum/Irwasum Polri (1 Mei 2020-2023). Komjen Agung Budi memasuki masa pensiun sebagai Pati Polri pada 23 Februari 2023.<sup>56</sup>

<sup>51</sup> [Profil Komut PT Wilmar Nabati Indonesia, MP Tumanggor, Tersangka Ekspor CPO | kumparan.com](https://www.kumparan.com)

<sup>52</sup> [MP Tumanggor dan Sejarah Kabupaten Pakpak Bharat | Tagar](https://www.tagar.com)

<sup>53</sup> [Gubernur Lantik Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat | dispmid.pakpakbharatkab.go.id](https://dispmid.pakpakbharatkab.go.id)

<sup>54</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220805081428-17-361272/kekayaan-tambah-rp-500-m-intip-gurita-bisnis-haji-isam?page=all>

<sup>55</sup> [Profil Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto dengan Sederet Pengharganya - Nasional Tempo.co](https://www.nasionaltempo.com)

<sup>56</sup> <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1579456-komjen-agung-budi-pensiun-kapolri-harap-tetap-beri-masukan-dan-dukungan-untuk-polri>



### **Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H.**

Mas Guntur Laupe menyelesaikan masa dinas di Kepolisian pada 2021 dengan jabatan terakhir Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri. Pensiunan polisi dengan pangkat Irjen Pol. ini pernah menjabat sebagai Direskrim Polda Kalimantan Selatan pada 2010, dan Kapolda Sulawesi Selatan pada 2019.<sup>57 58</sup>

Berdasarkan pengecekan data AHU PT Multi Sarana Agro Mandiri, 02 Juni 2022, Mas Guntur Laupe terdaftar sebagai komisaris. PT Multi Sarana Agri Mandiri merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Jhonlin Group melalui kepemilikan saham mayoritas oleh PT Eshan Agro Sentosa.



### **Drs. Soenarko Danu Ardanto**

Tidak banyak laporan yang mencatat riwayat dari purnawirawan Polri ini. Melalui penelusuran media, ditemukan bahwa ia pernah menjabat sebagai Kapolda Bali pada 2005-2006<sup>59</sup> dan Kapolda Jawa Barat medio 2006-2008.<sup>60</sup> Kemudian ia diangkat menjadi Deputy Pengkajian dan Strategis Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)<sup>61</sup>, serta terakhir pasca gonjang ganjing rekening gendut, Soenarko diangkat menjadi Deputy Operasi Kapolri mengisi jabatan Irjen Pol SY Wenas yang masuk masa pensiun.<sup>62</sup>

Pada 2011, Soenarko memasuki masa pensiun.<sup>63</sup> Berdasarkan penelusuran data AHU, pada 2012 Soenarko tercatat sebagai pemegang saham dan sekaligus sebagai Direktur PT Jhonlin Agro Mandiri. Saham yang dimilikinya sebanyak 2.500 lembar atau sebesar 0,3%. Sejak 2014 hingga 2021, Soenarko tercatat sebagai omisaris sekaligus pemegang saham. Setelah itu, ia berstatus pemegang saham hingga saat ini di anak usaha Jhonlin Grup.



### **Muhammad Hita Tunggal**

Pada 2019, Brigjen Muhammad Hita Tunggal merupakan Karoum Settama BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) diangkat menjadi Perwira staf ahli tingkat III Bidang Polkamnas Panglima TNI.<sup>64</sup> Dua bulan kemudian, pria kelahiran Magelang 11 Februari 1962 ini diangkat sebagai Staf Khusus Panglima TNI<sup>65</sup>, yang kala itu dijabat oleh Marssekal Hadi Tjahjanto (Saat ini menjabat Menkopolhukam, setelah sebelumnya menjabat Menteri ATR/BPN).<sup>66</sup>

<sup>57</sup> [Irjen Pol. \(Purn.\) Mas Guntur Laupe - TribunnewsWiki.com](#)

<sup>58</sup> [Sosok dan Kontroversi Kapolda Sulsel Baru | Tagar](#)

<sup>59</sup> [Sore Ini, Gedung Polda Bali Diresmikan | BALIPOST.com](#)

<sup>60</sup> [Jejak Karier Irjen Pol Drs Suntana, Kapolda Jabar ke-43 Gantikan Dofiri \(pejabatpublik.com\)](#)

<sup>61</sup> [Kombes Polisi Rumiah Kapolda Wanita Pertama - ANTARA News](#)

<sup>62</sup> [Pemilik Rekening Gendut Ikut Dimutasi | tribunnews.com](#)

<sup>63</sup> [Inilah Nama 12 Jenderal Polisi yang Dimutasi - TribunNews.com](#)

<sup>64</sup> [Laporan Kenaikan Pangkat 24 Perwira TNI AD](#)

<sup>65</sup> [TNI Mutasi Dan Promosi Jabatan 41 Pati](#)

<sup>66</sup> [Mengenal Hadi Tjahjanto: Mantan Panglima TNI Jadi Menteri ATR/BPN \(tirto.id\)](#)

Tertanggal 1 Juli 2020 - 18 Maret 2022, Muhammad Hita berdasarkan data AHU terdaftar sebagai Komisaris di PT Jhonlin Agro Raya, grup usaha Jhonlin yang memproduksi biodiesel. Pada Juni 2023 ia terdaftar sebagai Komisaris PT Adisurya Cipta Lestari, anak usaha Jhonlin Group. Selain menjabat di perusahaan Jhonlin Group, Muhammad Hita ternyata memegang posisi penting di PT Kawasan Industri Medan (KIM) anak usaha PT Danareksa (Persero).<sup>67</sup>

Muhammad Hita diangkat sebagai Direktur Pengembangan dan Operasional PT KIM berdasarkan surat keputusan No SK-24/MBU/01/2021; No. 539/236/2021; No. 538/0289 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Industri Medan.<sup>68</sup>



### **Dr. Muhammad Daming Sanusi**

Muhammad Daming Sanusi merupakan hakim yang purnabakti pada Juli 2019. Karir sebagai hakim dimulai pada 1983 di Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi (2006), Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (2010), Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin (2011), Ketua Pengadilan Tinggi Palembang (2013), Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (2014), dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya (2016)<sup>69</sup> <sup>70</sup> <sup>71</sup>. Pada 2013, Daming pernah ikut seleksi hakim agung, namun gagal.

Berdasarkan penelusuran di AHU, per Juni 2022, Muhammad Daming Sanusi tercatat sebagai Komisaris Utama PT Multi Sarana Agro Mandiri. Perusahaan tersebut terafiliasi dengan Jhonlin Grup melalui PT Eshan Agro Sentosa.



### **H.M. Hatta Ali**

H.M. Hatta Ali merupakan pensiunan hakim dengan jabatan terakhir selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hatta Ali tercatat menduduki posisi Ketua Mahkamah Agung selama 2 periode, yaitu 2012 sampai dengan 2020<sup>72</sup>.

Berdasarkan sumber yang sama, ia pernah menjabat berbagai posisi penting di pengadilan seperti Ketua Pengadilan Negeri Manado (2000), Ketua Pengadilan Negeri Tangerang (2001), Hakim Tinggi Denpasar (2003), Hakim Yustisial (2004), direktur di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (2005) dan Hakim Agung di Mahkamah Agung RI (2007). Berdasarkan penelusuran AHU, pada 24 Maret 2023, Hatta Ali tercatat sebagai Komisaris PT Jhonlin Group.

<sup>67</sup> <https://kim.co.id/laman/sejarah-singkat/>

<sup>68</sup> <https://kim.co.id/manajemen/>

<sup>69</sup> [Profil Hakim Daming Sunusi - Nasional Tempo.co](https://www.nasionaltempo.com)

<sup>70</sup> [Hakim yang Bercanda Soal Pemerksaan, Daming Sunusi Dipromosikan ke Jateng \(detik.com\)](https://www.detik.com)

<sup>71</sup> [Ketua MA Lantik Tiga Hakim Agung dan 18 Ketua Pengadilan Tinggi \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

<sup>72</sup> [Profil Hatta Ali, Ketua MA Dua Periode yang Pensiun 7 April Nanti - News Liputan6.com](https://www.liputan6.com)

Kedekatan Hatta Ali dengan Jhonlin Group ini setidaknya mulai terekam sejak 11 April 2014, saat itu Hatta Ali yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung meresmikan rumah jabatan Pengadilan Negeri Batulicin, yang diserahkan oleh Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming.<sup>73</sup> Setelah peresmian Pengadilan Negeri, Hatta Ali juga meresmikan pembangunan Masjid Jami' Al-Falah Batulicin yang diprakarsai oleh Jhonlin Group.<sup>74</sup>



### **Hanny Kuncoro Hendarso**

Berdasarkan akta perubahan Desember 2021 AHU Kemenkumham yang diakses pada 2023. Hanny Kuncoro Hendarso tercatat memiliki 0,65% saham PT Jhonlin Agro Mandiri. Ia pertama kali masuk sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut sejak Juni 2012. Hanny merupakan anak dari Purn. Kepala Polisi RI Bambang Hendarso yang menjabat pada 2008 hingga 2010.<sup>75 76</sup>



### **Jusuf Manggabarani**

Menjabat sebagai komisaris di PT Senabangun Anekapertiwi berdasarkan akta AHU perusahaan Kemenkumham Mei 2022. Perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan PT Jhonlin Agro Raya berdasarkan hubungan keluarga dari pemegang saham<sup>77</sup>.

Jusuf Manggabarani diketahui telah mengemban berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara. Ia pernah menjabat sebagai Kapolda Aceh (2022) dan Kapolda Sulawesi Selatan (2003). Pada 2005 ia menjabat sebagai Kadiv Propam dan pada 2007 diangkat menjadi Irwasum Polri. Puncaknya, pada 2010 ia didapuk menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI pada 2010 hingga 2011. Ia Mendampingi Kapolri Bambang Hendarso dan Timur Pradopo.<sup>78 79</sup>

<sup>73</sup> [Court Excellence of District Court Batulicin, South Kalimantan, Indonesia, diakses pada 02 Februari 2024.](#)

<sup>74</sup> <https://jhonlinmagz.wordpress.com/2014/06/16/pembangunan-masjid-jami-al-falah/>

<sup>75</sup> [DPR Wawancara Keluarga Bambang Hendarso - ANTARA News](#)

<sup>76</sup> [Bambang Hendarso Danuri - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

<sup>77</sup> [Laporan Tahunan 2022 PT Jhonlin Agro Raya Tbk](#)

<sup>78</sup> [Kisah Jusuf Manggabarani, Perwira Polri yang Terlalu Cinta pada Brimob dan Tolak Jabatan Kapolres - Halaman 2 - Tribun-timur.com \(tribunnews.com\)](#)

<sup>79</sup> [Kisah Jusuf Manggabarani, Mantan Wakapolri yang Kebal Senjata : Okezone Nasional](#)



### **Dudy Purwagandhi**

Dudy Purwagandhi pada 2019 menjabat sebagai wakil bendahara III Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.<sup>80</sup> Setelah Jokowi-Ma'ruf sukses menjadi presiden, pada 16 Januari 2020 Dudy Purwagandhi diangkat menjadi komisaris PT PLN berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No. SK-22/MBU/01/2020.<sup>81</sup> Hingga saat ini (2024) Dudy masih menjabat sebagai komisaris di perusahaan itu.

Tidak hanya di perusahaan plat merah, Dudy Purwagandhi berdasarkan temuan di dokumen AHU pada Juni 2022 ia memiliki saham sebesar 0,65% di PT Multi Sarana Agro Mandiri, perusahaan yang terafiliasi dengan Jhonlin Grup melalui PT Eshan Agro Sentosa.

---

<sup>80</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/05/31/114905426/berikut-daftar-19-relawan-jokowi-yang-jadi-komisaris-bumn?page=all>

<sup>81</sup> <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2022/08/laporan-tahunan-2020.pdf>

## BAB VI. PENUTUP

Sepanjang realisasi program biodiesel di Indonesia berjalan, keuntungan dari industri ini masih berpihak pada korporasi besar. Pengkajian ulang subsidi biodiesel perlu dilakukan dengan mengikut sertakan rantai pasok sawit dalam pembagian dana tersebut. Peralnya, pasca kehilangan pasar ekspor akibat penerapan kebijakan anti dumping dari Uni Eropa, pemerintah memberikan dana subsidi bagi pengusaha biodiesel pada 2015.

Sejak itu hingga 2023, dana sebesar Rp179 Triliun digelontorkan untuk menyokong pemenuhan biodiesel. Dana tersebut berasal dari pungutan ekspor *Crude Palm Oil (CPO)*. Sementara pungutan ekspor berasal dari pabrik sawit di sektor hulu, sebesar 71% dana yang dikumpulkan tersebut diberikan bagi biodiesel yang merupakan industri hilir.

Di sisi lain keberadaan PEP dalam struktur perusahaan membuat perusahaan tersebut memiliki potensi dalam penyalahgunaan kekuasaan, praktek korupsi dan suap serta pencucian uang. Untuk meminimalisir praktek-praktek tersebut, aturan mengenai PEP perlu dirumuskan secara komperhensif. Definisi terkait waktu jeda bagi pejabat publik dapat menjabat di perusahaan swasta juga perlu dibuat.

Sebanyak 18 orang tercatat sebagai pemilik manfaat maupun pengurus grup usaha biodiesel pernah atau memiliki jabatan publik. Tidak hanya jabatan publik, beberapa orang di antaranya merupakan pendukung aktif dalam berbagai pemilu. Keberadaan PEP dalam struktur kepengurusan maupun pemilik manfaat terindikasi memiliki pengaruh terhadap jumlah subsidi yang diterima.

Hal ini terlihat dalam besaran subsidi yang diterima dua grup usaha yaitu Wilmar dan Jhonlin. Meski hal ini baru dugaan, hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena belum ada transparansi terhadap asal dan realisasi penggunaan biodiesel sepanjang mandatori biodiesel diimplementasikan.



